

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Febri NurGita Sari
gitas4196@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of financial performance, especially; Fiscal Decentralization Level, Local Government of Financial Independence ratio of Local-owned Source Revenue on Human Development Index. The population was 38 district/cities in East Java province which consist of some district and 9 cities during 2016-2018. Moreover, the sample was taken from data of budget realization report and Human Development Index of district/city in East Java Province. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. Additionally, the data were secondary. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 22. The research result concluded Fiscal Decentralization Level had significant effect on Human Development Index. On the other hand, local Government of Financial Independence ratio had related but insignificant effect on Human Development Index. Meanwhile, effectiveness ratio of Local-owned Source Revenue had not related and insignificant effect on Human Development Index.

Keywords: decentralization level, effectiveness PAD, human development index.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan Khususnya; Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota periode 2016-2018. Berdasarkan populasi diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian menggunakan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif menggambarkan adanya hubungan yang berlawanan. Sementara, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kata Kunci: derajat desentralisasi, efektivitas PAD, indeks pembangunan manusia.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana beberapa aspek

pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Kinerja pemerintah yang sering dijadikan acuan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya kinerja keuangan. Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah cukup banyak, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat dan penduduk serta menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dalam kualitas harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum, oleh sebab itu indeks pembangunan manusia bagi Indonesia dapat dikatakan sebagai data yang strategis. Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia yang menjadi tujuan utama. Karena dasar dari pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu diutamakan alokasi belanja yang berhubungan dengan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran (Prakoso, 2017).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi mandat yang tertuang dalam undang-undang, yaitu UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang selanjutnya di revisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejak diberlakukannya UU otonomi daerah, kewenangan yang luas diberikan kepada daerah dalam pengelolaan berbagai sumber dayanya itu sendiri dengan terlibatnya pemerintah pusat sesedikit mungkin, seperti dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Tugas pokok pemerintah daerah saat ini yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum pada masyarakatnya. Ketika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut tercapai. Dalam pelaksanaan layanan publik yang baik dibutuhkan dana yang benar-benar ditunjukkan untuk hal tersebut. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat selain memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya, juga memberikan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya yakni dalam mengalokasikan pendapatan yang akan digunakan, termasuk dalam hal pengalokasian dana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, maka penting untuk mengangkat tema penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, khususnya derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD pada kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur?, (3) Apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan

menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Menurut Ibnu (1986:99) ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, diantaranya (a) kemampuan struktural organisasinya, (b) kemampuan aparat pemerintah daerah, (c) kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, (d) kemampuan keuangan daerah (Rondonuwu, 2016).

Menurut Mardiasmo (2002:121), tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: (a) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah, (b) Membantu mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan, (c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sedangkan menurut Halim (2007:230) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk tolak ukur dalam: (a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (b) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah meliputi: (a) Indikator Masukan (*Input*), (b) Indikator Proses (*Process*), (c) Indikator Keluaran (*output*), (d) Indikator Hasil (*Outcome*), (e) Indikator Manfaat (*Benefit*), (f) Indikator Dampak (*Impact*).

Dengan demikian setiap pemerintah daerah akan menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio efisiensi keuangan daerah, dan Rasio keserasian.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2009), adalah : (a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif. (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang. (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk berbelanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

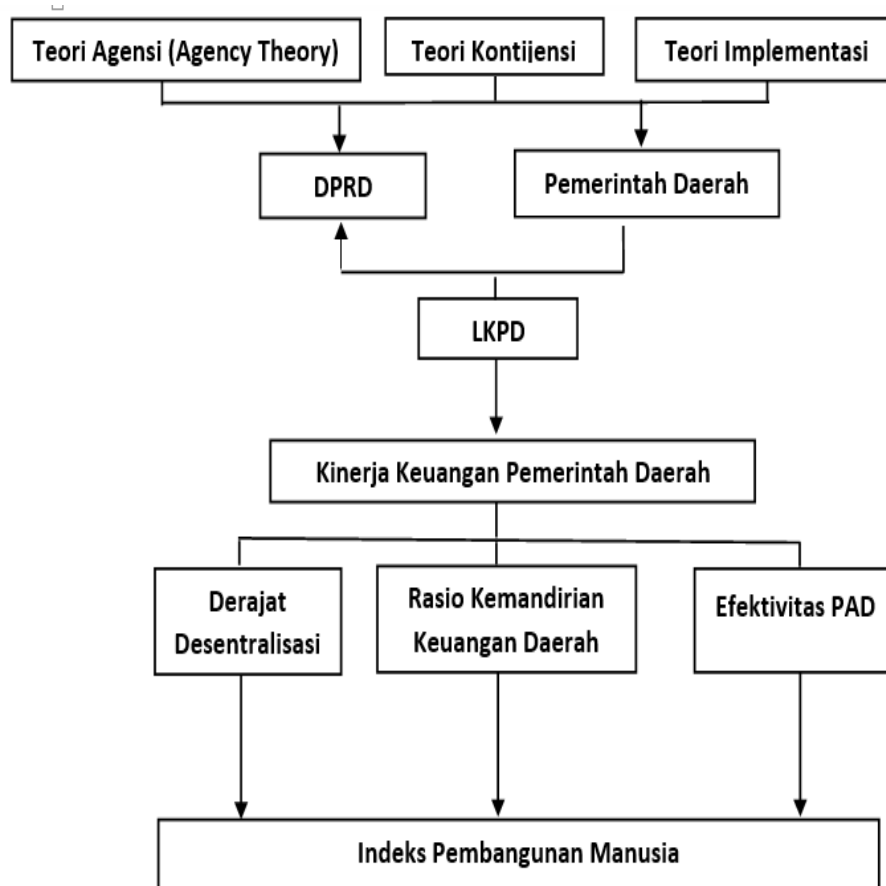
Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara yaitu: (1) Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). (2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). (3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Metode perhitungan Indeks Pembangunan manusia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yaitu (1) Indeks Harapan Hidup, menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharap dapat dinikmati masyarakat suatu daerah. Rata-rata lama hidup serta hidup sehat masyarakat digambarkan dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun. Perhitungan angka harapan hidup menggunakan metode tidak langsung karena sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. (2) Indeks Pendidikan (IP), mencakup dua indikator yaitu Rata-rata lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Gambaran dari indikator RLS merupakan gambaran dari ketampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan HLS merupakan gambaran dari lamanya sekolah yang diharap akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa yang akan datang. Populasi yang digunakan yaitu penduduk yang berusia 25 tahun keatas, dikarenakan penduduk usia 25 tahun keatas hanya sebagian kecil yang masih bersekolah. Padahal penduduk dengan usia 25 tahun merupakan stok pendidikan yang dimiliki suatu daerah. (3) Indeks Hidup Layak, digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), indikator yang digunakan yaitu Produk Nasional Bruto (PNB). Karena PNB dianggap mampu menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran merupakan suatu kesatuan rerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara

empiris, maka penelitian ini menjelaskan Pengaruh Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pemabangunan (Agustina *et al.*, 2006). Semakin tinggi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakintinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layananpublik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasr pengukuran Indeks Pembangunan manusia. Anggraini dan Sutaryo (2015) menyatakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dari beberapa uraian tersebut, maka hipotesis pertam adalah:

H₁: Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuagan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kemampuan daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya digambarkan dalam kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari luar daerahnya sendiri. Menurut Agustina *et al.*, (2006) kemadirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah dalam melaksanakan

kegiatan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan daerah maka pemerintah daerah semakin berpotensi dalam menyediakan layanan publik seperti ketersediaan gedung sekolah yang layak dan memadai, alat-alat kesehatan yang lengkap yang mampu mendukung kegiatan peyanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan maupun non makanan, sehingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai. Purbadharmaja dan Amalia (2014) menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H₂: Rasio Kemandirian keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan daerah tinggi belum tentu mampu melaksanakan kegiatan. Program penyediaan layanan publiknya secara baik jika penapatan yang diperoleh tidak dialokasikan dengan baik. Dalam menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya tergantung pada angka pendapatan, namun juga bagaimana pemerintah daerah mengolah pendapatan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan seluruh penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan ditunjukkan pada rasio efektivitas PAD. Dalam pengelolaan PAD yang secara efektif oleh pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan kegiatannya, yakni dalam hal penyediaan layanan publik khususnya bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang lain yang mempengaruhi standar layak hidup masyarakat sehingga tercapainya Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. Prakoso (2017) menyatakan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu berupa data dokumenter yang dikumpulkan dengan mempelajari catatan dari dokumen yang ada. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan, instansi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. (2) Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

Variabel Penelitian

Terdapat variabel bebas (Independent Variabel) yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1
Skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal

Skala Interval derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2
Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007: 234)

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang secara umum lebih fokus pada tujuan generalisasi. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 21, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \alpha + \beta_1\text{DD} + \beta_2\text{RKKD} + \beta_3\text{REPAD} + \varepsilon$$

Dimana :

- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi untuk variabel
- DD : Derajat Desentralisasi
- RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

REPAD : Rasio Efektivitas PAD
 ε : Error

Dari persamaan regresi diatas, selanjutnya akan dilakukan pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi empat tahap yaitu; Uji Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model dan Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
DD	114	,13	94	37,24	1,936	17,991
RKKD	114	,8	295	28,15	3,487	37,226
REPAD	114	,11	163	98,21	1,853	19,785
IPM	114	35,02	52,81	40,220	1,482	15,145
Valid N(listwise)	114					

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Indeks Pembangunan Manusia pada Tabel 4 memiliki nilai maksimum sebesar 52,81 terdapat pada kota Malang di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kota Malang termasuk dalam klasifikasi *high* yakni HDI atau Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki diatas 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Malang terpenuhi baik dalam bidang konsumsi masyarakat pendidikan maupun kesehatan. Selain itu juga terdapat nilai *mean* dari Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 40,220 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 15,145. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya bahwa distribusi data cenderung normal.

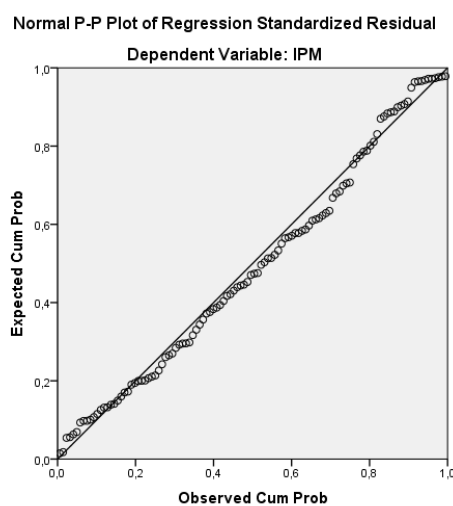
Derajat Desentralisasi pada Tabel 4 memiliki nilai minimum 0,13 terdapat pada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016, Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 dan di tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten dengan derajat desentralisasi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa Kabupaten tersebut termasuk dalam skala interval derajat desentralisasi fiskal antara 00,00-10,00 yang berarti bahwa kemampuan keuangan daerah "sangat kurang" sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi belum memadai. Sedangkan Derajat Desentralisasi yang memiliki nilai Maksimum sebesar 0,94 terdapat pada Kota Surabaya di tahun 2016. Hal ini menunjukkan fiskal diatas 50,00 yang berarti bahwa kemampuan daerah "sangat baik" sehingga kemampuan pemerintah daerah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan desentralisasi sangat memadai. Selain itu juga terdapat nilai *mean* dari Derajat Desentralisasi yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 37,24 dan memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* menunjukkan bahwa data cenderung normal.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tabel 4 memiliki nilai minimum 0,08 terdapat pada Kabupaten Sumenep pada tahun 2016-2017, dan Kabupaten Sampang menjadi kabupaten dengan derajat desentralisasi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten tersebut termasuk dalam kriteria kemampuan keuangan "rendah sekali" dengan tingkat

kemandirian antara 00,00-0,25 dan memiliki pola hubungan yang instruktif yang berarti bahwa peranan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih dominan dari pada peranan pemerintah daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pihak ekstern masih sangat tinggi dan daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri. Sedangkan Rasio Kemandirian Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 2,95 terdapat pada Kota Surabaya di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya termasuk dalam kriteria kemampuan keuangan “tinggi” dengan tingkat kemandirian diatas 1,00 dan memiliki pola hubungan yang delegatif yang berarti bahwa tingkat ketergantungan Kota Surabaya terhadap pemerintah pusat sangat rendah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat dikatakan Kota Surabaya adalah Kota yang Mandiri. Selain itu juga terdapat nilai *mean* dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 28,15 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 37,226. Nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak normal.

Rasio Efektivitas PAD pada Tabel 4 memiliki nilai minimum 0,11 terdapat pada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan termasuk dalam kriteria efektivitas yang “kurang efektif” dengan tingkat kemampuan keuangan antara 0,75-0,89, yang berarti bahwa peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah ditargetkan. Sedangkan Rasio Efektivitas PAD yang memiliki nilai maksimum sebesar 1,63 terdapat pada Kabupaten Sumenep di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten tersebut termasuk dalam kriteria efektivitas “sangat efektif” dengan tingkat kemampuan keuangan diatas 1,00 yang berarti bahwa peranan pemerintah kedua daerah tersebut dalam menggerakkan penerimaan PAD sesuai dengan yang telah ditargetkan. Selain itu juga terdapat nilai *mean* yang diperoleh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 98,21 dan nilai standar deviasi sebesar 19,785. Nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak normal.

Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari hasil Gambar 2 menunjukkan titik-titik data berada pada sekitar garis diagonal, meskipun titik-titik tidak begitu rapat ke garis diagonal tapi masih mengikuti arah diagonal. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini sudah

cukup baik terdistribusi normal dan model regresi tersebut sudah layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat menyebabkan kekeliruan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, Oleh sebab itu dianjurkan di samping menggunakan uji grafik dilengkapi pula dengan uji statistic, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non parametrik *kolmogorov-smirnov*. Jika hasilnya mempunyai nilai *Probability-value* $\geq 0,05$ maka dikatakan data normal. Berdasarkan hasil olah SPSS 22 uji statistic non parametik *kolmogorov-smirnov* didapat sebagai berikut:

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,08724479
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,618
Asymp. Sig. (2-tailed)		,489

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* Z sebesar 0,618 dengan tingkat signifikan 0,489 hal itu menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikansinya $\geq 0,05$ sehingga derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan indeks pembangunan manusia berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
DD	,600	1,667
1 RKKD	,602	1,660
REPAD	,971	1,030

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari hasil Tabel 6, terlihat bahwa dari ketiga variabel independen (bebas) dengan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada yang terjadi multikolinieritas. (Ghozali, 2006).

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
	,549 ^a	,322	,314	5,1560	,920

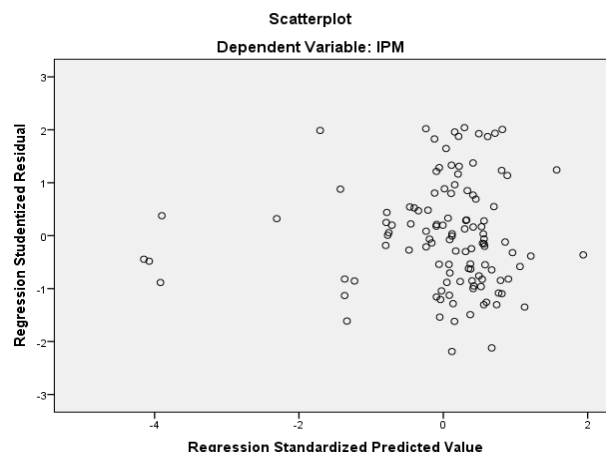
a. Predictors: (Constant), REPAD, RKKD, DD

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas Dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 0,920 terletak antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. Selain itu, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residunya (*ABS_RES*). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil Uji *Glejser* disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,127	1,589		4,485	,000
DD	1,049	,836	,262	1,338	,184
1 RKKD	-,984	,310	-,147	-1,392	,696
REPAD	-,724	,933	-,155	-1,629	,106

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa signifikansi ketiga variabel independen menunjukkan sig > 0,05 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap variabel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Kelayakan Model Uji F (*goodness of fit*)

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	66,814	3	22,271	3,838	,016 ^b
Residual	2924,447	110	26,586		
Total	2991,261	113			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), REPAD, RKKD, DD

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,016. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka signifikansi 0,016 lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,549 ^a	,322	,314	5,1560	,920

a. Predictors: (Constant), REPAD, RKKD, DD

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Hasil uji pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,322 atau 32,2% yang berarti bahwa pengaruh dari variabel derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur adalah relatif rendah. Sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan pada (R) sebesar 0,549 atau 54,9% yang mengindikasikan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara variabel derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD dengan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 11
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72,647	2,732		26,590	,000
DD	11,243	2,263	,183	1,682	,034
RKKD	-9,010	1,317	-,073	-,598	,551
REPAD	3,014	2,025	,055	-,574	,567

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari hasil pengujian uji t pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi untuk variabel derajat desentralisasi sebesar 0,034 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* $\alpha = 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel derajat desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Tingkat signifikansi

untuk variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,551 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* $\alpha = 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pada variabel rasio efektivitas PAD memiliki tingkat signifikan sebesar 0,567 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kesimpulan Hipotesis

Tabel 12
Hasil Hipotesis Penelitian

Keterangan	Hipotesis	Hasil
H ₁	Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	H ₀ ditolak yang berarti bahwa mendukung hipotesis (H ₁), artinya Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
H ₂	Pengaruh Rasio kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	H ₀ diterima yang berarti bahwa tidak mendukung hipotesis (H ₂), artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H ₃	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia	H ₀ diterima yang berarti tidak mendukung hipotesis (H ₃), artinya Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sumber: Data Ringkasan diolah, 2020

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 11,243 dengan nilai signifikan sebesar 0,034 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$) maka H₀ ditolak yang berarti bahwa mendukung hipotesis (H₁), artinya Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2015) yang mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti pada pemerintah provinsi di Indonesia. Pada penelitian ini Derajat Desentralisasi dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan daerah. Derajat Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengadaan layanan publik yang baik dan adil untuk masyarakat seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan analisis penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi suatu daerah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memungkinkan untuk dilaksanakannya pengadaan layanan publik bagi masyarakat yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Rasio kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,551 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar -9,010 maka H_0 diterima yang berarti bahwa tidak mendukung hipotesis (H_2), artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parkoso (2017) yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh peneliti tersebut di provinsi Lampung. Pada penelitian ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total pendapatan Transfer. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki total pendapatan transfer lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang tertuang pada pos belanja operasi. Belanja operasi bisa disebut juga dengan belanja aparatur daerah seperti belanja barang, belanja pegawai, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kebutuhan daerah yang tertuang pada pos belanja operasi belum mampu dipenuhi dengan semestinya, maka pos belanja modal yang berkaitan dengan layanan publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat dan juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Berdasarkan analisis penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi juga dapat menurunkan kualitas layanan publik pada masyarakat, dikarenakan anggaran yang dimiliki lebih ditunjukkan untuk pos belanja operasi, sedangkan dalam pelaksanaan layanan publik guna mempertahankan layanan publik yang baik juga memerlukan dana. Apabila dana untuk pemeliharaan layanan publik tidak dapat dipenuhi, maka dapat menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga Indeks Pembangunan manusia juga akan menurun.

Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -3,014 dengan nilai signifikan sebesar 0,567 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima yang berarti tidak mendukung hipotesis (H_3), artinya Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Prakoso (2017), yang menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung, Melainkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika Evlyn (2016), yang menyatakan bahwa rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten / Kota se- Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Anggaran PAD. Dapat diketahui bahwa hasil dalam penelitian ini menunjukkan Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemungkinan hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat rendah, sehingga tidak sebanding dengan biaya kebutuhan yang tertuang dalam pos belanja operasi maupun pos belanja modal. Meskipun pendapatan asli daerah dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah melebihi target yang dianggarkan, PAD tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang tertuang dalam pos belanja operasi. Apabila sebagian besar PAD digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tertuang dalam pos belanja operasi, misalkan hanya untuk memenuhi pos belanja pegawai, maka PAD tidak dapat dialokasikan untuk memenuhi aktivitas yang tertuang dalam pos belanja modal,

dimana pos belanja modal merupakan pos pengeluaran yang berkaitan akan kebutuhan masyarakat setempat atau pembangunan daerah untuk meningkatkan layanan publik. Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD yang tinggi tidak mempengaruhi meningkatnya layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan Uji Kelayakan Model pada Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan bahwa model tersebut layak digunakan dalam penelitian. (2) Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Derajat Desentralisasi suatu daerah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memungkinkan untuk dilaksanakannya pengadaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa Rasio Kemandirian Keuangan yang tinggi juga dapat menurunkan kualitas layanan publik pada masyarakat, dikarenakan anggaran yang dimiliki lebih ditunjukan untuk pos belanja operasi, sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan publik guna mempertahankan layanan publik yang baik juga memerlukan dana. Apabila dana pemeliharaan layanan publik tidak dapat dipenuhi, maka dapat menurunkan kualitas publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga Indeks Pembangunan Manusia juga akan menurun. (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa dengan Rasio Efektivitas PAD yang tinggi tidak mempengaruhi pengadaan layanan publik yang baik untuk masyarakat, sehingga Indeks pembangunan Manusia tidak berpengaruh.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah (a) Data Indeks Pembangunan Manusia pada penelitian ini diambil langsung dari Badan Pusat Statistik, (b) Penelitian ini hanya menggunakan kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, (c) Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini relatif rendah yakni hanya sebesar 32,2% hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang relatif tinggi yakni sebesar 67,8% dari variabel - variabel lain diluar model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diajukan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Dengan meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah maka desentralisasi fiskal dapat terlaksana sehingga mampu melaksanakan pengadaan layanan publik yang baik dan adil untuk masyarakat seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas objek penelitian yakni

tidak hanya pada Provinsi Jawa Timur dan lebih memperpanjang rentang waktu penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum. (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi penelitian ini seperti variabel non keuangan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia misalnya pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. E. Rochaida, dan Y. Ulfah. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(2).
- Anggraini, T. dan Sutaryo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2016. www.jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang .
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ibnu, S. 1986. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. CV Rajawali. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Pengaruh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Prakoso, I. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Purbadharmaja, I. B. P dan Amalia, F. R. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks pembangunan Manusia. Bali: ISSN 2303-0178.
- Rondonuwu, G. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2014. Sam Ratulangi: *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4 (2)
- Widodo, J. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV. Citra Malang. Malang.